

Mendagri Tjahjo Kumolo

Akan Pecat 2.150 PNS Koruptor

Reporter: Eko Widiyanto (Kontributor)

Editor: Juli Hantoro

Senin, 10 September 2018 19:04 WIB



Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menjawab pertanyaan awak media se usai melakukan kunjungan bersama gubernur dan wagub di gedung KPK, Jakarta, Rabu, 5 September 2018. ANTARA/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan akan memecat 2.150 pegawai negeri sipil atau [PNS](#) yang terlibat korupsi. Hasil rapat koordinasi dengan Menteri Pembedayaan Aparatur Negara, Badan Kepegawaian Nasional dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mereka akan diberhentikan secara tidak hormat.

Baca juga: [KPK Minta PNS Koruptor Segera Diberhentikan](#)

"Sudah memiliki kekuatan hukum tetap sidang tipikor. Tapi sampai saat ini masih menerima gaji dan belum diberhentikan," kata Tjahjo di Malang, Senin 10 September 2018. Sesuai Undang Undang, katanya, mereka layak diberhentikan dan dicabut hak normatifnya.

"Saat ini masih dipilah," katanya. Mendagri dan Menpan, katanya, telah membahas secara detail, termasuk semua data telah dipegang. Untuk itu, akan dikeluarkan surat bersama Mendagri dan Menpan agar memiliki dan memenuhi kepastian hukum. "Mereka bersalah, dan memiliki kekuatan hukum tetap," katanya.

Baca juga: [Kepala Daerah Diimbau Berhentikan PNS Koruptor yang Masih Aktif](#)

Sebelumnya, Badan Kepegawaian Negara (BKN) mencatat 2.674 [PNS](#) yang korupsi dan dipenjara, namun mayoritas masih berstatus PNS aktif. Dari 2.674 PNS koruptor, sebanyak 317 sudah diberhentikan dengan tidak hormat. "Sebanyak 2.357 di antaranya

masih PNS aktif," kata Kepala BKN Bima Haria Wibisana di Gedung KPK, Jakarta, Selasa, 4 September 2018.
